

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Terdapat tiga jenis lembaga pendidikan yang ada di negara Indonesia yang dikelompokkan berdasarkan pola pendidikan dalam mencerdaskan masyarakat yakni pesantren, madrasah dan sekolah. Di Indonesia telah dikenal beberapa sistem pendidikan sebelum Belanda bahkan kaum modern melakukan pembaharuan seperti pesantren yang ada di Jawa, surau berada di Minangkabau, dan Meunasah yang dikenal di Aceh. Dari berbagai macam lembaga pendidikan yang bercorak tradisional tersebut, pesantren tetap bertahan hingga masa kini.¹ Di sisi lain, pesantren juga termasuk dalam lembaga yang bercorak Islam selain madrasah.

Produk dari perkembangan pendidikan pesantren utamanya adalah pendalaman ilmu agama. Muzhoffar Akhwan mengemukakan bahwa perbedaan madrasah dan pesantren yang paling utama adalah terletak pada sistem pendidikannya. Sistem yang dianut oleh madrasah adalah pendidikan formal yang menggunakan kurikulum Nasional dalam pelaksanaan pembelajarannya, adapun sistem yang dianut pesantren adalah sistem non formal yang memiliki kurikulum bersifat lokal.²

Pendidikan merupakan salah satu tolok sejarah dalam pembangunan pemerintahan di Indonesia. Dalam UUD 1945 dinyatakan dengan lugas bahwa

¹ Rustam Ibrahim, "Eksistensi Pesantren Salaf di tengah arus Pendidikan Modern (Studi Multisitus pada beberapa pesantren salaf di Jawa Tengah)", *Analisa*. 2 (Desember: 2014), h. 254

² Muzhoffar Akhwan, "Pengembangan Madrasah sebagai Pendidikan untuk semua", *Jurnal Pendidikan Islam El Tarbawi*. 1 (2008), h. 42.

tujuan pemerintah Indonesia terkait dengan pendidikan, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 3 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 20 tentang dalam rangka membantu peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, cakap, kreatif, mandiri, dan tumbuh menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, pendidikan nasional berperan krusial dalam pengembangan profesi mereka.³ Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi saat ini, semakin banyak pula keinginan untuk melakukan berbagai kemajuan dalam bidang pendidikan. Kenyataannya, hampir tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikan pesatnya kemajuan teknologi dan penerapannya.

Pendidikan membutuhkan tata kelola yang baik dan manajemen yang tepat. Manajemen pendidikan yang baik meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Manajemen yang tepat guna, serta memperhatikan situasi dan kondisi lapangan sehingga *output* yang dihasilkan sesuai dengan keutuhan pendidikan. Pembaharuan kurikulum merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia oleh pemerintah. Saat ini kurikulum yang sedang diupayakan oleh pemerintah adalah Kurikulum Merdeka. Dalam Kurikulum Merdeka, desain pembelajaran memungkinkan siswa belajar secara kreatif, bertahap, tanpa merasa tergesa-gesa, dan tetap memperhatikan kemampuan bawaan mereka dikenal sebagai pembelajaran mandiri. Menurut Nadiem Makarim,

³ JDIIH BPK RI,” Undang-undang RI Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Diakses pada 05 Desember 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003#:~:text=Dalam%20UU%20ini%20diatur%20mengenai,bahasa%20pengantar%3B%20dan%20wa%20jib%20belajar>

Kurikulum Merdeka adalah sebuah gagasan yang berupaya memungkinkan siswa untuk mengejar minat dan keterampilan masing-masing.

Tujuan Pendidikan Nasional pada Kurikulum Merdeka yang termaktub dalam draf RUU Sisdiknas adalah kehidupan bangsa harus tercerahkan, masyarakat yang religius harus ditegakkan, keberagaman harus dijunjung tinggi, demokrasi harus dipraktikkan, peradaban harus dimajukan, dan manusia harus disejahterakan secara jasmani dan intelektual. Tujuan ini menjadi norma bagi semua lembaga, termasuk yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Agama, dalam hal melaksanakan manajemen pendidikan yang sejalan dengan tren terkini.

Penamaan pendidikan karakter bagi peserta didik dengan Profil Pelajar Pancasila yang memiliki enam dimensi menjadi salah satu pokok bahasan yang menjadi fokus penyempurnaan Kurikulum Merdeka. Setiap butir soal memiliki uraian rinci tentang masing-masing dimensi. Dimensi-dimensi tersebut meliputi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keberagaman di seluruh dunia, kerja sama, kemandirian, berpikir kritis, dan kreativitas..⁴

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikankeagamaan Bab 1, pasal 2, ayat (1) dan (2) yang mengandung beberapa pembahasan yakni 1. Pendidikan agama didefinisikan sebagai pengajaran yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan kemampuan siswa dalam menjalankan ajaran agamanya. Hal ini dilakukan, paling tidak, melalui kursus dan ceramah

⁴ Dewi Rahmadayanti dan Agung Hartoyo "Potret Kurikulum Merdeka, Wujud Merdeka Belajar di Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu* 6, no. 4 (Desember 2022): 6-7,

di semua jalur, jenjang, dan bentuk pendidikan: 2. Pendidikan agama adalah pengajaran yang membekali siswa untuk menjadi ahli agama atau untuk memenuhi tugas yang menuntut penguasaan doktrin agama dan kemampuan untuk mengamalkan doktrin tersebut.⁵

Tujuan pendidikan agama Islam adalah membantu siswa menerapkan dan mengamalkan prinsip-prinsip Islam tanpa dipaksa. Siswa dapat mengamalkan ilmu agamanya dan memasukkan Islam ke dalam kehidupan sehari-hari sebagai cara memahami ajaran Islam.⁶

Pendidikan agama mengkaji manusia secara holistik, yang tidak hanya membantu manusia memahami agama atau tumbuh secara intelektual, tetapi juga memperhatikan manusia seutuhnya, dimulai dengan perilaku sehari-hari yang selaras dengan ajaran agama, termasuk yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan, orang lain, alam, dan diri sendiri.⁷

Dalam KMA No. 347 tahun 2022 dijabarkan bahwa kriteria minimal dalam capaian kemampuan peserta didik sesuai dengan hasil pembelajarannya yang terdiri dari kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang sering disebut dengan Standar Kompetensi Lulusan Madrasah. Pada tingkat Madrasah Aliyah, kompetensi

⁵ “JDIH BPK RI,” Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007, Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Bab I, pasal 2, ayat (1) dan (2), Diakses pada 05 Desember 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4777/pp-no-55-tahun-2007>.

⁶ Abdul Majid, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 130.

⁷ Zakiyyah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 124

lulusan (SKL) mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dijabarkan menjadi Al-Quran dan Hadits, Akidah, Fikih, Sejarah Peradaban Islam, dan Bahasa Arab.⁸

Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Kediri adalah suatu lembaga pendidikan menengah atas yang berafiliasi pada Kementerian Agama Republik Indonesia. Madrasah yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto 58 Kota Kediri, tepatnya terletak 100 meter dari Stadion Brawijaya. Target prestasi dan madrasah berkualitas merupakan orientasi tujuan yang dicanangkan dalam visi dan misi madrasah.

Sejarah berdirinya madrasah ini sejak 25 Agustus tahun 1950 bernama SGAI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 166/C-9/50. Pengubahan nama serentak dari PGAN menjadi MAN berdasarkan SK Menteri Agama RI tanggal 27 Januari 1992 No. 42. Madrasah ini beralih nama menjadi MAN 3 Kediri. Perubahan nama terakhir berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 673 tahun 2016 madrasah tersebut berganti MAN 2 Kota Kediri.⁹

Dalam menjalankan aktivitasnya serta dalam menjaga eksistensinya, Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Kediri menggunakan jargon dalam mewujudkan visi dan misi madrasah yakni *The Center of Achievement and Civilization* yang berarti Pusat Prestasi dan Peradaban. Peningkatan kualitas yang dibinakan di madrasah adalah pembinaan dan pembiasaan siswa yang: memiliki iman dan takwa (imtak) yang baik, berkepribadian yang islami, berwawasan imtak, serta menjadikan anak kreatif dan mandiri.

⁸ KMA RI No 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah Bab II, Diakses pada 28 Agustus 2023, <https://www.ayomadrasah.id/2022/04/pedoman-kurikulum-merdeka-belajar-di.html>

⁹ www.man2kotakediri.sch.id/, diakses tanggal 28 februari 2023

Dari uraian di atas peneliti berkeinginan membuat penelitian untuk menggali informasi secara deskriptif tentang permasalahan penerapan Kurikulum Merdeka baik di persiapan maupun cara mengaplikasikannya yang terkhusus pada salah satu mata Pelajaran PAI yakni Fiqih. Maka dari itu, penulis merumuskan judul dalam penelitian ini yaitu “ *Implementasi Pembelajaran Fiqih Berbasis Kurikulum Merdeka di MAN 2 Kota Kediri*”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang telah ditentukan, maka berdasarkan konteks penelitian ternyata banyak model atau metode yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran Fiqih berbasis Kurikulum Merdeka di MAN 2 Kota Kediri sehingga penulis menentukan batasan masalah, yakni implementasi Pembelajaran Fiqih berbasis Kurikulum Merdeka di kelas X dan XI MAN 2 Kota Kediri.

C. Fokus Penelitian

Sesuai dengan latar penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, fokus masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.:

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran Fiqih berbasis Kurikulum Merdeka di MAN 2 Kota Kediri?
2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Fiqih berbasis Kurikulum Merdeka di MAN 2 Kota Kediri?
3. Bagaimana evaluasi pembelajaran Fiqih berbasis Kurikulum Merdeka di MAN 2 Kota Kediri?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perencanaan Kurikulum Merdeka dalam mata pelajaran Fikih di MAN 2 Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Kurikulum Merdeka dalam mata pelajaran Fikih di MAN 2 Kota Kediri.
3. Untuk mengetahui evaluasi Kurikulum Merdeka dalam mata pelajaran Fikih di MAN 2 Kota Kediri.

E. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini bermanfaat atau berguna sesuai dengan tujuan yang telah disebutkan di atas. Berikut ini adalah beberapa manfaat atau kegunaan penelitian ini:

Dalam segi teoritis, penelitian ini memiliki kegunaan atau manfaat dalam pengembangan keilmuan, khususnya untuk mengetahui motivasi siswa dalam belajar di era modern seperti ini yang rata-rata masyarakat sekarang ini memiliki kecenderungan perilaku hedonisme.¹⁰ Apakah para siswa – siswi yang belajar di era modern ini, motivasinya hanyalah untuk *tafaqquh fiddin*, atau para siswa – siswi juga memiliki motivasi selain itu.

Dalam segi *praktis*, penelitian ini bisa dijadikan rujukan bagi sekolah dalam menentukan kebijakannya. Sebagai contoh dalam menentukan kurikulum maupun kegiatan apakah sudah selayaknya untuk menambah atau mengganti kurikulum atau

¹⁰ Sebagaimana yang terjadi di Sekolah Umum (Formal) dan Pendidikan Tinggi, motivasi para peserta didiknya lebih dominan untuk *mendapatkan pekerjaan* dari pada mencari ilmu.

kegiatan baru, karena melihat adanya pergeseran motivasi siswa dalam belajar di sekolah – sekolah, ataukah masih mempertahankan pengajaran tradisional yang dipandang masih layak untuk diterapkan. Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat muslim yang bisa memberi informasi menarik bagi masyarakat yang ingin mendidik anaknya di sekolah – sekolah yang menerapkan kurikulum berbasis kompetensi peserta didik yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini.

F. Penegasan Istilah

Penulis menggunakan beberapa definisi operasional dalam judul tulisan ini, antara lain sebagai berikut: Beberapa definisi perlu ditetapkan guna mencegah terjadinya salah tafsir, antara lain:

1) Implementasi.

Menurut etimologi, implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan (Darmoko, 2009: 246). Proses mengubah konsep, hukum, atau penemuan menjadi kegiatan berguna yang dapat memengaruhi pengetahuan, kemampuan, nilai, dan sikap orang dikenal sebagai implementasi.

Sebaliknya, istilah “implementasi” dalam penelitian tesis ini mengacu pada prosedur aplikasi yang diawali dengan fase perencanaan (menganalisis capaian pembelajaran, assesmen, modul, kemajuan belajar), kemudian proses pelaksanaan (penerapan pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan kesiapan, minat, dan gaya belajar peserta didik). Dalam hal

ini, penulis menyajikan data mulai dari perencanaan pembelajaran, kemudian pelaksanaan pembelajaran tersebut.

2) Pembelajaran Fiqih

Agar siswa berhasil memperoleh tiga komponen kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap belajar merupakan proses interaksi antara guru dan siswa. Selanjutnya arti kata fiqh menurut Syafi'i Karim, Fiqh adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum-hukum yang mempunyai ciri-ciri *furuiyah* sehingga menjadikannya mengalami *istidlal*. Al-Amidi mendefinisikan *furuiyah* sebagai ilmu yang memuat dalil-dalil dan berbagai macam dalil yang dapat dijadikan hujjah. Lebih jauh, *istidlal* merujuk pada penggunaan teknik *muttafaq* untuk mendukung klaim-klaim yang dibuat oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan *Al-Maslahh*.¹¹

Disamping Al-Quran Hadits, Aqidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), dan Bahasa Arab, siswa Madrasah Aliyah, sekolah menengah yang dikelola oleh Kementerian Agama, mempelajari fikih Islam sebagai salah satu mata pelajaran agama mereka untuk melengkapi tugas kuliahnya.

Untuk mencapai tujuan kelembagaan tersebut maka memerlukan tercapainya tujuan kurikulum yang diterapkan untuk tercapainya tujuan pembelajaran melalui pembelajaran terapan, yang dalam konteks ini adalah bahan pembelajaran yang terdiri dari enam komponen pembelajaran (tujuan, materi, metode, media), komponen evaluasi, dan kegiatan pembelajaran,

¹¹ Irma Dwi Amalia, *Implementasi Kurikulum Merdeka dalam meningkatkan mutu pembelajaran Fiqih di MAN 1 Nganjuk* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), hal 21-22.

sehingga dengan penerapan komponen-komponen tersebut dapat diarahkan baik keterampilan-pencapaian tujuan pembelajaran yang bersangkutan, (المُوقِفِينَ النَّاحِيَةَ) ranah sikap/afektif (الْحُرُوكَةَ النَّاحِيَةَ) psikomotor.

3) Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka memberi guru kemampuan untuk bereksperimen dengan keterampilan mereka berdasarkan sumber daya, masukan, dan fasilitas mereka. Guru juga mampu menyajikan pembelajaran dalam bentuk sumber daya yang mendesak dan diperlukan berkat Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka juga penting untuk memberi siswa berbagai kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka dan mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan.

